

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Kementerian Koperasi dan UKM merupakan kementerian yang membidangi kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM).

Pada Perpres No. 24 Tahun 2010 pasal 552, 553 dan 554 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM bertugas membantantu penyelenggaraan pemerintahan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan pada bidang koperasi dan UMKM.
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada penyelenggaraan kebijakan pada bidang koperasi dan UMKM.
- c. Melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas barang atau kekayaan milik negara.
- d. Melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM

- e. Menyelenggarakan fungsi pada penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan UMKM sesuai dengan UU pada bidang koperasi dan UMKM.

Sedangkan sejarah dibentuknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang koperasi dan usaha mikro. Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pada bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Melaksanakan kebijakan pada bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan administrasi dinas.
- d. Melaksanakan fungsi lain yang telah diberikan oleh bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung juga berperan sebagai OPD Lingkungan Pemerintah Daerah Tulungagung yang membantu mensukseskan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RCMD) Kabupaten Tulungagung.

2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

a. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Visi merupakan cara pandang atau suatu gambaran mengenai masa depan yang diharapkan oleh instansi pada pemerintahan untuk tetap eksis, inovatif dan antisipatif. Visi tersebut juga disusun sesuai dengan dengan kondisi atau karakteristik yang ada pada suatu daerah.

Oleh karena itu, pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung disusunlah visi sebagai berikut :
“Terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia”

b. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Misi adalah pernyataan sebagai tujuan instansi pemerintah beserta sasaran yang ingin dicapai dalam organisasi dan dijalankan berdasarkan visi yang telah dibuat. Dalam menentukan misi yang akan dijalankan, organisasi harus mempertimbangkan saran dari pihak yang memiliki kepentingan sebagai bentuk peluang inovasi dan perubahan menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menyusun misi sebagai berikut : “Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;

mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah penegentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat”

B. Deskripsi Data Variabel

1. Diskripsi Data Variabel Bebas

Variabel bebas adalah data yang dapat mempengaruhi atau terjadinya perubahan atas variabel terikat.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yang diamati yaitu insentif pajak (X_1), sikap (X_2), kesadaran (X_3), pengetahuan (X_4) dan sanksi perpajakan (X_5). Berikut merupakan data variabel bebas yang disajikan pada penelitian ini:

a. Insentif Pajak (X_1)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembalikan kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Insentif Pajak (X_1) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Frekuensi Variabel Pengendalian Internal (X_1)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0,0	7	7,0	21	21,0	39	39,0	33	33,0	3,98
X1.2	0	0,0	8	8,0	27	27,0	37	37,0	28	28,0	3,85
X1.3	0	0,0	5	5,0	26	26,0	33	33,0	36	36,0	4,00
X1.4	0	0,0	21	21,0	18	18,0	33	33,0	28	28,0	3,68

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X1.1) yaitu insentif pajak diberikan kepada UMKM guna membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi saat covid 19 mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,98, yang mana 7% responden yang menyatakan tidak setuju, 21% responden menyatakan netral, 39% responden menyatakan setuju dan 33% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X1.2) yaitu insentif pajak diberikan kepada UMKM yang memenuhi syarat-syarat dari kantor pajak mendapatkan rata-rata jawaban responden sebesar 3,85, dimana pada pernyataan tersebut terdapat 8% menyatakan tidak setuju, 27% responden netral, 37% menyatakan setuju dan 28% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 3) Pada pernyataan ketiga (X1.3) bahwa insentif pajak sangat menguntungkan UMKM mendapatkan nilai rata-rata responden sebesar 4,00, dimana 5% responden menyatakan tidak setuju, 26% menyatakan netral, 33% responden menyatakan setuju dan 36% responden menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X1.4) bahwa insentif pajak diberikan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak memperoleh nilai rata-rata responden sebesar 3,68, yang mana 21% responden menyatakan tidak setuju, 18% menyatakan netral, 33% menyatakan setuju dan 28% menyatakan sangat setuju.

b. Sikap (X₂)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Sikap (X₂) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Frekuensi Variabel Sikap (X₂)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0,0	2	2,0	22	22,0	46	46,0	30	30,0	4,04
X2.2	0	0,0	0	0	9	9,0	58	58,0	33	33,0	4,24
X2.3	0	0,0	1	1,0	17	17,0	47	47,0	35	35,0	4,16
X2.4	0	0,0	1	1,0	8	8,0	50	50,0	41	41,0	4,31

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X2.1) yaitu petugas pajak melayani wajib pajak dengan ramah mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,04, yang mana 2% responden yang menyatakan tidak setuju, 22% responden menyatakan netral, 46% responden menyatakan setuju dan 30% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X2.2) yaitu petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan wajib pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,24, yang mana 9% responden menyatakan netral, 58% responden menyatakan setuju dan 33% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X2.3) yaitu wajib pajak tidak mengetahui dan paham sanksi saat melakukan pelanggaran mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,16, yang mana 1% responden yang menyatakan tidak setuju, 17% responden

menyatakan netral, 47% responden menyatakan setuju dan 35% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 4) Pada pernyataan keempat (X2.) yaitu wajib pajak tidak keberatan dengan tarif pajak yang dikenakan untuk UMKM mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,31, dimana 1% responden yang menyatakan tidak setuju, 8% responden menyatakan netral, 50% responden menyatakan setuju dan 41% responden yang menyatakan sangat setuju.

c. Kesadaran (X₃)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Kesadaran (X₃) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Frekuensi Variabel Kesadaran (X₃)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	0	0,0	19	19,0	10	10,0	27	27,0	44	44,0	3,96
X3.2	0	0,0	12	12,0	19	19,0	39	39,0	30	30,0	3,87
X3.3	0	0,0	8	8,0	9	9,0	41	41,0	42	42,0	4,17
X3.4	0	0,0	47	47,0	19	19,0	18	18,0	16	16,0	3,03

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X3.1) pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi untuk menambah pendapatan negara mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,96, dimana 19% responden yang menyatakan tidak setuju, 10% responden menyatakan netral, 27% responden menyatakan setuju dan 44% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X3.2) yaitu hasil dari pembayaran pajak untuk membangun fasilitas negara mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,87, yang mana 12% responden menyatakan tidak setuju, 19% menyatakan netral, 39% responden menyatakan setuju dan 30% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X3.3) yaitu melakukan penundaan pajak dapat dikenakan sanksi mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,17, yang mana 8% responden yang menyatakan tidak setuju, 9% responden menyatakan netral, 41% responden menyatakan setuju dan 42% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X3.4) yaitu pernyataan berbentuk negative bahwa melakukan kecurangan pajak tidak melanggar hukum mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,03, dimana

47% responden yang menyatakan tidak setuju, 9% responden menyatakan netral, 18% responden menyatakan setuju dan 16% responden yang menyatakan sangat setuju.

d. Pengetahuan (X_4)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Pengetahuan (X_4) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Frekuensi Variabel Pengetahuan (X_4)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X4.1	0	0,0	21	21,0	24	24,0	38	38,0	17	17,0	3,51
X4.2	0	0,0	2	2,0	12	12,0	53	53,0	33	33,0	4,17
X4.3	0	0,0	9	9,0	10	10,0	58	58,0	23	23,0	3,95
X4.4	1	1,0	18	18,0	12	12,0	30	30,0	39	39,0	3,88

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (X4.1) WPOP sangat mengetahui aturan pajak bagi UMKM mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,51, dimana 21% responden yang menyatakan tidak

setuju, 12% responden menyatakan netral, 38% responden menyatakan setuju dan 17% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 2) Pada pernyataan kedua (X4.2) Wajib pajak mengetahui cara pelaporan SPT pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,17, yang mana 2% responden menyatakan tidak setuju, 12% menyatakan netral, 53% responden menyatakan setuju dan 33% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X4.3) wajib pajak mengetahui tariff pajak yang dikenakan untuk UMKM mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,95, yang mana 9% responden yang menyatakan tidak setuju, 10% responden menyatakan netral, 58% responden menyatakan setuju dan 23% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X4.4) yaitu wajib pajak mengetahui fungsi manfaat pajak sebagai anggaran pembangunan negara mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,88, dimana 1% menyatakan sangat tidak setuju, 18% responden yang menyatakan tidak setuju, 12% responden menyatakan netral, 30% responden menyatakan setuju dan 39% responden yang menyatakan sangat setuju.

e. Sanksi Perpajakan (X_5)

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan kepada WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang telah diterima WPOP Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung dapat kembali kepada peneliti secara keseluruhan sebanyak 100 kuesioner.

Tanggapan yang telah diberikan terhadap kuesioner yang diterima terhadap variabel Sanksi Perpajakan (X_5) dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan (X_5)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X5.1	0	0,0	5	5,0	52	52,0	24	24,0	19	19,0	3,57
X5.2	0	0,0	13	13,0	41	41,0	28	28,0	18	18,0	3,51
X5.3	0	0,0	12	12,0	45	45,0	39	39,0	4	4,0	3,35
X5.4	0	0,0	15	15,0	55	55,0	21	21,0	8	8,0	3,21

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama ($X_{5.1}$) terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,57, dimana 5% responden yang menyatakan tidak setuju, 52% responden menyatakan netral, 24% responden menyatakan setuju dan 19% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 2) Pada pernyataan kedua (X5.2) bahwa sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,51, yang mana 13% responden menyatakan tidak setuju, 41% menyatakan netral, 28% responden menyatakan setuju dan 18% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X5.3) sanksi pajak diberikan dengan tegas apabila ada yang melanggar mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,35, yang mana 12% responden yang menyatakan tidak setuju, 45% responden menyatakan netral, 39% responden menyatakan setuju dan 4% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X5.4) yaitu dengan dihapusnya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,21, dimana 15% responden yang menyatakan tidak setuju, 55% responden menyatakan netral, 21% responden menyatakan setuju dan 8% responden yang menyatakan sangat setuju.

2. Deskripsi Data Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang diamati oleh peneliti adalah kepatuhan wajib pajak sektor UMKM (Y).

Berikut ini adalah tanggapan responden atas kuesioner yang telah diterima untuk variabel kepatuhan WPOP sektor UMKM (Y), dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Frekuensi Variabel Kepatuhan WPOP Sektor UMKM (Y)

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-Rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1.1	0	0,0	38	38,0	19	19,0	31	31,0	12	12,0	3,17
Y1.2	0	0,0	4	4,0	9	9,0	50	50,0	37	37,0	4,20
Y1.3	0	0,0	14	14,0	14	14,0	51	51,0	21	21,0	3,79
Y1.4	0	0,0	14	14,0	12	12,0	55	55,0	19	19,0	3,79

Sumber: output SPSS versi 27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada pernyataan pertama (Y1.1) pemilik UMKM tidak diwajibkan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi perpajakan mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,17, dimana 38% responden yang menyatakan tidak setuju, 19% responden menyatakan netral, 31% responden menyatakan setuju dan 12% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 2) Pada pernyataan pertama (Y2.1) wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT dengan, benar, jelas dan di tanda tangani mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 4,20, dimana 4% responden yang menyatakan tidak setuju, 9% responden menyatakan netral, 50% responden menyatakan setuju dan 37% responden yang menyatakan sangat setuju.

- 3) Pada pernyataan ketiga (Y3.1) wajib pajak harus melakukan penghitungan pajak terutang mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,79, dimana 14% responden yang menyatakan tidak setuju, 14% responden menyatakan netral, 51% responden menyatakan setuju dan 21% responden yang menyatakan sangat setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (Y4.1) wajib pajak harus melakukan pelunasan pembayaran SPT kurang bayar setiap masa pajak mendapatkan rata-rata jawaban sebesar 3,79, dimana 14% responden yang menyatakan tidak setuju, 14% responden menyatakan netral, 51% responden menyatakan setuju dan 21% responden yang menyatakan sangat setuju.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan alat bantu program statistic dengan menggunakan analisis linier berganda. Syarat yang digunakan saat menggunakan analisis linier berganda yaitu perlu adanya pengujian beberapa asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

1) Analisis Statistik

Pengujian normalitas pada suatu data yaitu bertujuan untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas apakah berdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik yaitu dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai sig lebih besar dari 0,05.

Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7

Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,02605686
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,046
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *output* SPSS versi 27

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.7 Diketahui nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

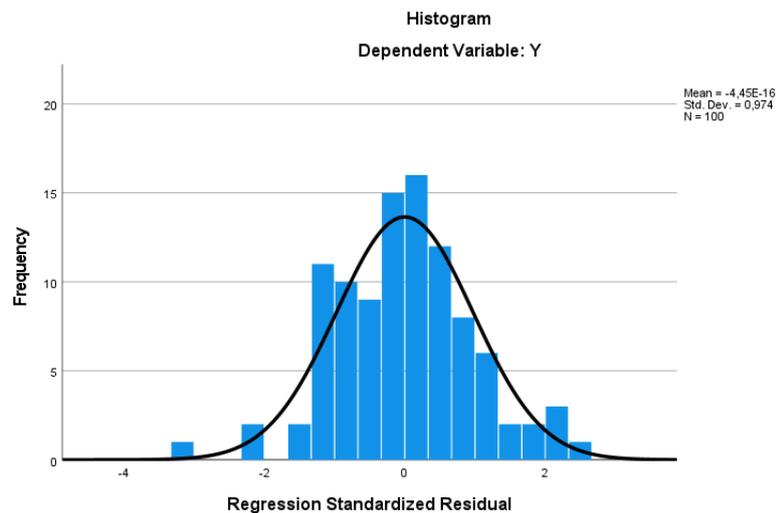
2) Analisis Grafik

Pengujian analisis menggunakan grafik adalah dengan melihat grafis histogram maupun *probability plot*. Karena model regresi yang baik akan mendistribusikan data secara normal atau dengan mendekati normal. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai uang dihasilkan berada di interval -2 dan 2.

Menurut (Santoso, 2015)

“Grafik histogram dapat disimpulkan normal apabila distribusi pada data berbentuk lonceng yaitu tidak condong ke kanan maupun ke kiri”

Hasil pada uji normalitas dengan mengamati grafik histogram dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Sumber: *output* SPSS versi 27

Gambar 4.1

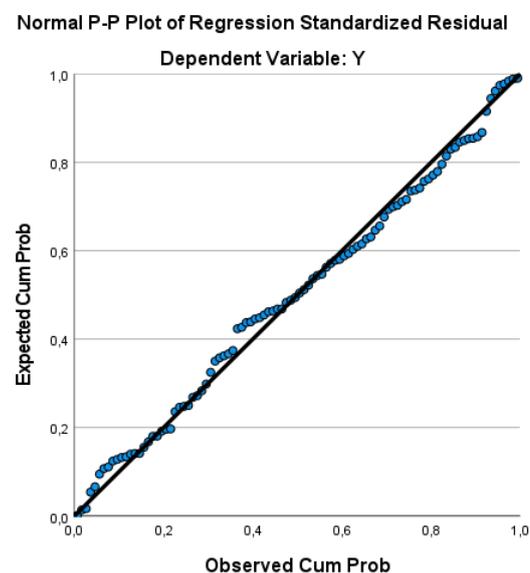
Grafik Histogram

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa berdistribusi dengan normal, karena membentuk pola yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Metode lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal adalah dengan melihat *probability plot*. Karena apabila data normal, maka garis pada data yang sesungguhnya akan membentuk mengikuti garis diagonal.

Menurut (Ghozali, 2018) untuk menganalisis data yang berdistribusi secara normal pada grafik *probability plot* yaitu dengan melihat sebagai berikut:

- 1) Data berdistribusi secara normal jika data titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada garis diagonal.
- 2) Data tidak berdistribusi normal jika data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah pada garis diagonal

Uji normalitas dengan *probability plot* dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: *output* SPSS versi 27

Gambar 4.2

Normal *Probablity* Plot

Gambar di atas dapat menunjukkan bahwa data dapat terdistribusi dengan normal karena semua distribusi data mendekati garis diagonalnya. Akan tetapi, apabila dilihat pada gambar terdapat beberapa titik yang tidak mendekati garis diagonal. Namun keadaan tersebut dapat dikategorikan normal karena titik yang mengikuti garis diagonal dan tidak tersebar terlalu jauh.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel dalam model regresi (Ghozali, 2018). Karena model regresi yang baik tidak ada korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 maka dapat dikatakan variabel tersebut terbebas dari multikolinieritas.

Hasil dari uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,948	1,055
	X2	,919	1,089
	X3	,913	1,095
	X4	,928	1,078
	X5	,942	1,062

a. Dependent Variable: Y

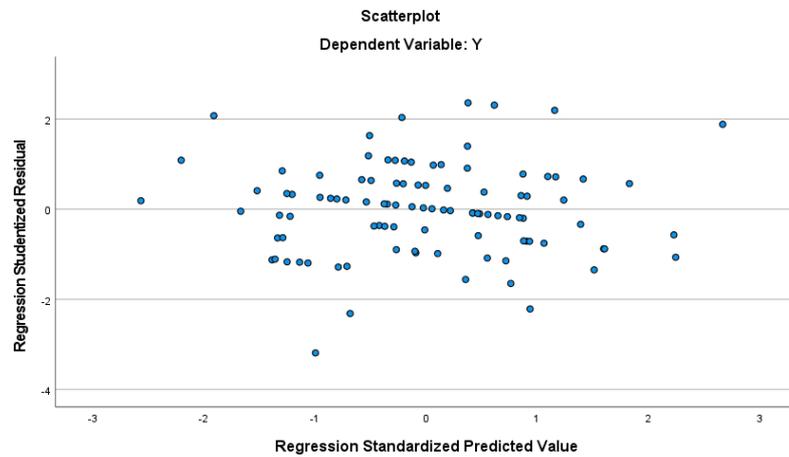
Sumber: *output SPSS versi 27*

Berdasarkan hasil output hasil uji multikolinieritas di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel independen insentif pajak sebesar 1,005, sikap sebesar 1,089, kesadaran sebesar 1,062, yang mana nilai VIF semua variabel tersebut lebih kecil dari < 10 . Maka dapat diartikan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Untuk pengujiannya dengan melihat grafik *scatterplot*. Pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat titik-titik yang tersebar apabila tidak menggambarkan suatu pola tertentu maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas:



Sumber: *output* SPSS versi 27

Gambar 4.3

Grafik *Scatterplot*

Dengan melihat *output* hasil uji heterokedastisitas di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data terletak di atas dan di bawah atau berada di sekitar 0 serta penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Hasil Analisis Linier Berganda

Dari hasil uji *Coefficient* pada *output* SPSS versi 27 terdapat lima variabel independen yaitu Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Tabel *Coefficient*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	14,697	3,153	
	X1	-,161	,105	-,157
	X2	,060	,128	,049
	X3	-,057	,102	-,059
	X4	,205	,110	,193
	X5	-,043	,094	-,047

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

Berdasarkan pada tabel uji coefficient di atas, yang diinterpretasikan merupakan nilai yang terdapat pada kolom B, pada tabel baris yang pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya pada tabel menunjukkan konstanta pada variabel independen. Sehingga, persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \\
 &= 14,697 + (-0,161) + 0,060 + (-0,057) + 0,205 + (-0,043) + 3,153
 \end{aligned}$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Nilai a sebesar 14,697 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan WPOP (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel insentif pajak (X1), sikap (X2), kesadaran (X3), pengetahuan (X4), dan sanksi perpajakan (X5). Jika variabel

independen tidak ada, maka variabel kepatuhan WPOP tidak mengalami perubahan.

- b. b1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar -0,161, menunjukkan bahwa variabel insentif pajak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap penurunan satuan variabel insentif pajak, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar -0,161, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. b2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,060, menunjukkan bahwa variabel sikap mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel sikap, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar 0,060, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. b3 (nilai koefisien regresi X3) sebesar -0,057, menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap penurunan satuan variabel kesadaran, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar -0,057, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- e. b4 (nilai koefisien regresi X4) sebesar 0,205, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel pengetahuan, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP

sebesar 0,205, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

- f. b_5 (nilai koefisien regresi X_5) sebesar -0,043, menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan WPOP yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan, maka akan mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar -0,043, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besaran nilai R^2 yang berada diantara 0 dan 1.

Tabel 4.10

Tabel Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 ^a	,269	,230	873

a. Predictors: (Constant), X_5 , X_4 , X_1 , X_2 , X_3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) dan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square). Dimana R menjelaskan bahwa variabel independen (X) dalam menerangkan variasi terhadap variabel dependen (Y). Sesuai dengan hasil data yang diolah, maka dapat dihasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 51,9% yang dapat di

artikan bahwa variabel X (Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel Y (Kepatuhan WPOP) tergolong dalam kategori sedang.

Selanjutnya pada nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,269, yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 26,9%.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Penggunaan pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah terdapa pengaruh secara parsial Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan $sig = 0,05$.

Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	11,098	,000
	X1	-3,648	,000
	X2	1,127	,263
	X3	-1,338	,184
	X4	4,434	,000
	X5	-1,080	,283

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output* SPSS versi 27

- a. $H_1 : 0,000 < \text{sig } 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga Insentif Pajak (X_1) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- b. $H_2 : 0,263 > \text{sig } 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga Sikap (X_2) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- c. $H_3 : 0,184 > \text{sig } 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga Kesadaran (X_3) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- d. $H_4 : 0,000 < \text{sig } 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga Pengetahuan (X_4) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).
- e. $H_5 : 0,283 > \text{sig } 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga Sanksi Perpajakan (X_5) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP (Y).

E. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji

heteroskedastisitas dan melakukan pengujian hipotesis seperti analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji parsial.

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,000 < \text{sig } 0,05$. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang pertama (H_1) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan. Pada saat pandemi covid-19 banyak perusahaan yang terdampak, dikarenakan jumlah omzet yang menurun mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan merasa keberatan dengan beban pajak yang dibayarkan.

Dengan dikeluarkannya PMK No 44/PMK.03 Tahun 2020 yang berlaku sejak bulan April-September 2020 memberikan keringanan pajak terhadap UMKM dan telah ditanggung oleh negara dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian insentif pajak tersebut juga diperpanjang oleh pemerintah melalui PMK No. 149/PMK.03/2021 dengan tujuan untuk UMKM yang ada di Indonesia dapat tetap bertahan karena UMKM adalah salah satu penggerak perkembangan perekonomian.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuridah & Megawati, 2022) bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,263 > \text{sig } 0,05$. Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang kedua (H_2) menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Khotimah et al., 2020) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistensian hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah sudut pandang negatif wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,184 > \text{sig } 0,05$. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ketiga (H_3) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak tidak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak akan terlalu berpengaruh atau sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena meskipun wajib pajak tersebut sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak belum tentu wajib pajak tersebut dapat patuh dalam membayar pajaknya.

Hasil dalam penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khotimah et al., 2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Pengetahuan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,000 < \text{sig } 0,05$. Maka hipotesis yang keempat (H_4) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung diterima.

Pengetahuan perpajakan sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembauaran pajak. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan, maka wajib pajak dapat mengetahui hak, kewajiban dan pentingnya manfaat pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan sebagai pembangunan.

Wajib pajak yang memahami ketentuan undang-undang perpajakan dapat meningkatkan penerimaan negara yang memiliki dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhannya akan naik karena telah memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan dari pembayaran pajak.

Hasil dalam penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khotimah et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil dalam pengujian pada penelitian yang telah dilakukan secara parsial terhadap variabel Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil dari uji t sebesar $0,283 > \text{sig } 0,05$. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yang kelima (H_5) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung.

Meningkat dan turunnya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peraturan pajak yang berlaku tidak menjadi ancaman bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran. Wajib pajak yang tidak takut, acuh dan tidak merasa terbebani dengan sanksi saat melakukan pelanggaran yang membuat sanksi perpajakan menjadi tidak berpengaruh. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan tidak menjadi penjamin bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Khotimah et al., 2020) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.